

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Pada dasarnya distribusi pendapatan merupakan suatu konsep tentang penyebaran pendapatan diantara seseorang dengan orang lainnya atau di antara rumah tangga dalam masyarakat. Distribusi pendapatan biasanya diukur oleh dua konsep pokok, yaitu konsep ketimpangan absolut dan ketimpangan relatif. Ketimpangan absolut adalah konsep pengukuran ketimpangan yang didasarkan pada sebuah nilai mutlak. Sedangkan ketimpangan relatif merupakan konsep pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang membandingkan besarnya pendapatan yang diterima seseorang atau suatu kelompok dengan total pendapatan yang diterima oleh masyarakat di daerah tersebut secara keseluruhan (Ahluwalia dalam Sukirno, 2006).

Untuk mengukur ketimpangan pendapatan diantara penduduk, ukuran yang digunakan berdasarkan pada ukuran *size distribution of income*. Namun, karena data pendapatan sulit diperoleh, maka pengukuran ketimpangan atau distribusi pendapatan selama ini didekati dengan data pengeluaran. Dalam hal ini, analisis distribusi pendapatan diperoleh dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai proksi pendapatan, terkait dengan hal tersebut, terdapat empat ukuran yang

merefleksikan ketimpangan distribusi pendapatan yaitu Koefisien Gini (Gini Ratio), Ukuran Bank Dunia, Indeks Theil dan Indeks-L.

Menurut Todaro dan Smith (2006) Gini Ratio adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Berikut rumus umum koefisien gini diperlihatkan pada persamaan 1.

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^N [fp_i(fc_i + fc_{i-1})] \dots \dots \dots (Persamaan 1)$$

Dimana:

GR = Koefisien Gini (Gini Ratio)

Fpi = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

Fci = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

Fci-1 = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)

2.1.2 Inklusi Keuangan

Menurut World Bank atau Bank Dunia, inklusi keuangan adalah akses bagi setiap orang atau bisnis untuk bisa memanfaatkan produk ataupun layanan keuangan. Layananan ini berperan penting untuk bisa memenuhi segala kebutuhan manusia setiap hari, seperti transaksi pembayaran, tabungan, kredit serta asuransi yang bisa dikerjakan secara efektif dan kontinyu. Sedangkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

atau OJK Nomor 76/POJK.07/2016, inklusi keuangan adalah suatu ketersediaan akses untuk berbagai produk, layanan jasa keuangan dan lembaga.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016, setidaknya terdapat empat tujuan inklusi keuangan. Pertama, untuk meningkatkan akses masyarakat pada suatu produk, lembaga atau layanan jasa keuangan. Kedua, untuk menyediakan produk atau layanan jasa keuangan PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan). Ketiga, meningkatkan produk atau layanan jasa keuangan yang bisa disesuaikan dengan kemampuan dan keperluan masyarakat luas. Terakhir, demi meningkatkan kualitas produk serta layanan jasa keuangan.

Indeks inklusi keuangan merupakan ukuran untuk tingkat inklusi keuangan. Indeks inklusi keuangan ini akan digunakan untuk mengukur tingkat inklusi keuangan di 33 provinsi di Indonesia dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Indeks inklusi keuangan mencakup tiga dimensi yaitu dimensi penetrasi perbankan, ketersediaan jasa perbankan, dan penggunaan jasa perbankan. Indeks inklusi keuangan dapat dihitung jika masing-masing dimensi telah dihitung nilai indeks dimensi. Indeks dari setiap dimensi (d_i), dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 2:

$$d_i = W_i \frac{A_i - m_i}{M_i - m_i}$$

Dimana:

d_i = Dimensi

W_i = Bobot untuk dimensi i

A_i = Nilai terkini dari perubahan i

M_i = Nilai maksimum (batas atas) dari perubahan i

m_i = Nilai minimum (batas bawah) dari perubahan i

Semakin tinggi nilai indeks suatu dimensi, semakin tinggi pula pencapaian di dalam dimensi tersebut. Misalkan, semakin tinggi indeks dimensi ketersediaan suatu provinsi, semakin tinggi pula jumlah bank yang dapat dijangkau masyarakat di provinsi tersebut. Untuk menghitung indeks setiap dimensi memerlukan bobot. Bobot ditentukan berdasarkan seberapa besar dimensi tersebut dapat mempengaruhi inklusi keuangan. Dalam penelitian ini, seluruh dimensi diasumsikan memiliki peranan yang sama penting dalam menentukan tingkat inklusi keuangan, sehingga masing-masing dimensi memiliki bobot sebesar 1. Selain menentukan bobot, untuk menghitung indeks setiap dimensi inklusi keuangan memerlukan batas atas dan batas bawah dari setiap indikator. Batas atas maupun batas bawah harus dijadikan nilai tetap. Batas bawah atau nilai minimum (m_i) setiap dimensi dalam penelitian ini adalah 0. Sedangkan untuk menentukan batas atas atau nilai maksimum (M_i) setiap indikator, ditentukan oleh sebaran masing-masing indikator.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada responden dengan kuesioner yang telah didesain sebelumnya. Kuesioner SNLIK 2016 disusun dengan mengacu pada kuesioner SNLIK 2013 dengan tambahan dan modifikasi dari beberapa pertanyaan yang diadaptasi dari *Financial Capability Survey* (2013) dan *Global Financial Inclusion Index* (2014) dilaksanakan oleh World Bank dan 2015 *OECD/ INFE Toolkit for Measuring Financial Literacy and Financial Inclusion* yang dilaksanakan oleh *Organisation for Economic Co-*

operation and Development (OECD). Adapun teknis pengukuran indeks literasi keuangan adalah hasil perbandingan jumlah masyarakat yang memiliki tingkat literasi yang baik (*well literate*) dengan total jumlah responden pada masing-masing klaster. Demikian pula halnya indeks inklusi keuangan adalah perbandingan jumlah masyarakat yang menggunakan produk dan layanan jasa keuangan dengan total jumlah responden pada masing-masing klaster. Dalam mengukur indeks literasi, terdapat aspek pengenalan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan lembaga jasa keuangan dikelompokkan kedalam 6 sektor jasa keuangan yaitu perbankan, perasuransian, lembaga pembiayaan (perusahaan pembiayaan dan modal ventura), pasar modal (perusahaan efek dan manajer investasi), pergadaian dan dana pensiun. Demikian halnya dalam mengukur indeks inklusi keuangan, masyarakat yang dikatakan inklusif secara keuangan adalah masyarakat yang menggunakan produk dan layanan jasa keuangan dalam kurun waktu 12 bulan terakhir dihitung dari waktu pelaksanaan survei.

2.2 Studi Terkait

Wan dan Zhou (2004) menggabungkan kerangka nilai Shapley yang dikembangkan dari Shorrocks (1999) dan teknik dekomposisi berbasis regresi dalam menganalisis ketimpangan distribusi pendapatan di pedesaan Cina. Penggunaan data tingkat rumah tangga melengkapi sebagian besar studi yang ada dan ketersediaan data *time series* memungkinkan mereka untuk memeriksa perubahan ketimpangan pendapatan total dan komponennya dari waktu ke waktu. Ditemukan bahwa geografi adalah variabel paling signifikan. Penanaman modal telah menjadi faktor terpenting

dalam mempengaruhi ketimpangan pendapatan di pedesaan Cina. Satu-satunya variabel penyeimbang adalah input lahan tetapi dampaknya sangat kecil. Pola tanam lebih penting daripada input tenaga kerja dan modal manusia untuk membuat ketimpangan pendapatan total. Disarankan bahwa Cina harus berusaha untuk meningkatkan layanan kredit pedesaan dan meningkatkan hasil panen biji-bijian untuk mengurangi ketimpangan. Dampak pendidikan terhadap ketimpangan tergolong kecil tetapi diperkirakan akan meningkat. Angkatan kerja saat ini menikmati akses pendidikan yang hampir setara sebelum reformasi. Karena kesenjangan dalam pendidikan telah meluas dalam 15 tahun terakhir atau lebih dan karena ekonomi pedesaan menjadi lebih menuntut keterampilan, kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan pendapatan dan ketimpangan diperkirakan akan meningkat.

Bae, Han, dan Sohn (2012) menyelidiki hubungan antara akses keuangan, dan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Dengan pertama-tama mendefinisikan akses keuangan dan mengidentifikasi berbagai pengukuran akses keuangan. Selanjutnya, mengkaji studi sebelumnya tentang dampak akses keuangan. Terakhir, dengan menggunakan data panel estimasi *fixed effect* dilakukan untuk menganalisis dampak akses keuangan terhadap ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan. Analisis ini adalah studi pertama yang memanfaatkan data tingkat negara bagian tentang akses keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses keuangan berpengaruh positif dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan rasio kemiskinan.

Umah et al. (2015) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keuangan inklusif dengan regresi tobit panel, dan menggambarkan hubungan antara inklusi

keuangan dan distribusi pendapatan di Indonesia. Mereka menggunakan data tingkat akses dan penggunaan jasa keuangan antar provinsi di Indonesia tahun 2007-2011. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan di Indonesia tergolong rendah. Ukuran ekonomi dan ketimpangan pendapatan berpengaruh positif pada tingkat inklusi keuangan. Berlawanan dengan hipotesis penelitian, melebarinya ketimpangan pendapatan menyebabkan inklusi keuangan yang lebih tinggi di Indonesia. Selain itu, jumlah pengguna ponsel dan internet berpengaruh positif terhadap tingkat inklusi keuangan di Indonesia. Ketimpangan pendapatan dan inklusi keuangan memiliki hubungan satu arah, ketimpangan pendapatan mempengaruhi inklusi keuangan di Indonesia tetapi tidak sebaliknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Afifah dan Efri (2019) bertujuan menganalisis pengaruh inklusi keuangan dan variabel ekonomi makro lainnya terhadap ketimpangan pendapatan di 33 provinsi di Indonesia tahun 2012-2017 dengan menggunakan metode regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inklusi keuangan memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Sementara itu, variabel ekonomi makro yang memiliki pengaruh yang signifikan yaitu inflasi berpengaruh positif dan Upah Minimum Provinsi (UMP) riil berpengaruh negatif, sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan.

Kusuma dan Indrajaya pada tahun (2020) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh inklusi keuangan terhadap tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat di 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2014

hingga 2018. Mereka menunjukkan bahwa inklusi keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat. Namun, inklusi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh perkembangan industri perbankan di Provinsi Bali yang masih belum merata dan terkonsentrasi di Bali Selatan. Dalam hal ini, inklusi keuangan berpengaruh tidak langsung terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat melalui tingkat kemiskinan.

